

IMPLEMENTASI PROGRAM KOMPENSATORIS PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS (PDPD) DALAM PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 28 SURABAYA

Jelita Jernih Aristu¹, Supriyanto²

¹ Universitas Negeri Surabaya; jelita.21036@mhs.unesa.ac.id

² Universitas Negeri Surabaya; supriyantotupriyanto@unesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Program Kompensatoris;
Peserta Didik Penyandang
Disabilitas;
Akomodasi yang Layak.

Riwayat artikel:

Diterima 18-07-2025

Direvisi 20-07-2025

Diterima 21-07-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan memahami implementasi program kompensatoris Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) dalam rangka pemenuhan akomodasi yang layak di SMPN 28 Surabaya. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh dari Wakil Kepala Sekolah, Koordinator Guru Pembimbing Khusus, Guru Pembimbing Khusus, Guru BK, Koordinator Guru Kelas, serta para Peserta Didik Penyandang Disabilitas itu sendiri. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Uji keabsahan data meliputi, uji kredibilitas dengan triangulasi dan membercheck, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program kompensatoris merupakan bentuk alternatif pembelajaran untuk PDPD tanpa mengubah isi atau materi ajar berdasarkan pada kurikulum yang sama dengan peserta didik reguler. Terdapat 2 program kompensatoris yang diimplementasikan di SMPN 28 Surabaya yaitu Kesenian dan Cooking Class.

Penulis yang sesuai:

Jelita Jernih Aristu

Universitas Negeri Surabaya; jelita.21036@mhs.unesa.ac.id

1. PERKENALAN

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang dikenal sebagai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), menegaskan bahwa setiap individu penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang bersifat inklusif. Dalam Pasal 24, CRPD mewajibkan setiap negara pihak untuk memastikan bahwa peserta didik penyandang disabilitas dapat menikmati layanan pendidikan dasar dan menengah yang bersifat gratis, inklusif, serta berkualitas. Dokumen ini menjadi acuan internasional yang paling komprehensif dalam

mendorong penerapan pendidikan inklusif dan nondiskriminatif, serta memberikan panduan operasional bagi negara-negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan yang setara bagi semua individu tanpa kecuali (Paramansyah & Parojai, 2024). Menurut definisi yang dinyatakan oleh Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang kini disebut sebagai Peserta Didik Penyandang Disabilitas merupakan individu yang menunjukkan adanya penyimpangan signifikan dalam proses tumbuh kembangnya. Penyimpangan ini dapat terjadi pada aspek fisik, kognitif, sosial, maupun emosional, dan berbeda secara nyata dibandingkan dengan perkembangan peserta didik pada umumnya di usia yang sama (Ningrum, 2022). Peserta Didik Penyandang Disabilitas menurut Hidayah et al. (2019) peserta didik yang menghadapi kondisi disabilitas atau gangguan perkembangan tertentu umumnya memerlukan layanan pendidikan khusus atau dukungan tambahan selama mengikuti proses pembelajaran. Kebutuhan ini muncul karena adanya tantangan individual yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif di lingkungan belajar reguler, sehingga dibutuhkan strategi pendidikan yang disesuaikan agar pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 22,5 juta jiwa. Angka tersebut setara dengan kurang lebih 5% dari total populasi nasional (Lafiana et al., 2022). Sumber data terbaru yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai kurang lebih 22,97 juta orang, atau sekitar 8,5% dari total jumlah keluarga. Sementara itu, laporan statistik yang dipublikasikan oleh kementerian yang sama pada bulan Juni 2022 mencatat bahwa prevalensi penyandang disabilitas dalam kelompok usia anak-anak dan remaja, yaitu rentang usia 5–19 tahun, berada pada angka sekitar 3,3%. Data ini menunjukkan adanya keberlanjutan isu disabilitas dalam konteks pendidikan dan perlindungan anak (Islam et al., 2024). Peningkatan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebagaimana tercermin dalam pembaruan data resmi, turut berdampak pada peningkatan partisipasi mereka dalam sektor pendidikan, termasuk melalui jalur sekolah inklusi. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan inklusif di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Berbagai hambatan yang dihadapi sekolah antara lain adalah keterbatasan dalam penerapan metode pembelajaran yang adaptif, minimnya akses terhadap layanan pendampingan psikologis, serta belum optimalnya pelaksanaan asesmen yang berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus peserta didik secara tepat. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip pendidikan inklusif yang tercantum dalam kebijakan dengan realitas implementatif di satuan pendidikan, sehingga dibutuhkan upaya lebih lanjut dari berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar inklusif, responsif, dan bermutu bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang menyandang disabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Ketentuan ini menegaskan komitmen konstitusional negara dalam menjamin hak seluruh warga, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, untuk memperoleh akses terhadap pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan layanan pendidikan yang setara dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, tanpa terkecuali bagi individu dengan kebutuhan khusus (Kalalo et al., 2022). Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 5 ayat (2), menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, termasuk mereka yang mengalami hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, maupun sosial. Ketentuan ini memperkuat

prinsip bahwa peserta didik penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk mengikuti proses pendidikan bersama dengan teman sebayanya dalam lingkungan belajar yang inklusif. Pendidikan inklusif membuka ruang bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk bersekolah di satuan pendidikan reguler, dengan dukungan yang sesuai agar mereka dapat mengakses pembelajaran secara adil tanpa mengalami perlakuan diskriminatif dalam bentuk apa pun.

Kebutuhan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) sangatlah beragam dan kerap kali berbeda secara signifikan dibandingkan dengan peserta didik non-disabilitas. Dalam praktiknya, PDPD menghadapi tantangan pembelajaran yang lebih kompleks dan bervariasi, sehingga proses pendidikan terhadap mereka menuntut pendekatan yang lebih individual dan adaptif. Pendidikan bagi PDPD memerlukan metode yang disesuaikan secara spesifik dengan kondisi dan karakteristik masing-masing individu. Sebagai contoh, peserta didik dengan hambatan pendengaran tidak dapat hanya mengandalkan instruksi lisan atau tulisan, melainkan membutuhkan dukungan tambahan seperti juru bahasa isyarat, alat bantu dengar, serta pemanfaatan media visual dan imajinatif untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi ajar. Di sisi lain, bagi peserta didik penyandang disabilitas intelektual, strategi pembelajaran perlu dirancang secara konkret dan aplikatif agar lebih mudah dipahami. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan kebutuhan masing-masing PDPD menjadi hal yang krusial bagi pendidik dalam merancang layanan pendidikan maupun akomodasi yang tepat guna.

Sebagaimana pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023, akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas diartikan sebagai bentuk penyesuaian dan modifikasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan individual sesuai dengan karakteristik dan jenis hambatan yang dimiliki. Akomodasi ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari penyesuaian dalam proses pembelajaran, pengembangan materi, sistem evaluasi, hingga pengaturan lingkungan fisik yang mendukung terciptanya aksesibilitas. Implementasinya dapat berupa penyediaan akses fisik, seperti toilet yang ramah disabilitas dan pengaturan ruang kelas yang inklusif, fleksibilitas waktu, modifikasi metode penyampaian pembelajaran, serta pemanfaatan alat bantu seperti buku braille, alat bantu dengar, *screen reader*, dan teknologi adaptif lainnya. Dalam konteks pembelajaran dan evaluasi, bentuk akomodasi juga direpresentasikan melalui pelaksanaan program kompensatoris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, yang mengatur mengenai pemberian tugas alternatif bagi peserta didik penyandang disabilitas. Program kompensatoris ini tidak hanya mempertimbangkan faktor teknis dan fisik, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam bentuk penugasan dan penilaian. Misalnya, peserta didik dengan hambatan penglihatan dapat diberi tugas secara lisan sebagai pengganti tugas tertulis, sedangkan peserta didik dengan hambatan intelektual dapat diberikan penugasan visual dengan arahan yang sederhana dan konkret. Melalui tugas alternatif dalam program kompensatoris ini, peserta didik tetap memiliki kesempatan untuk menunjukkan kompetensinya berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, tanpa menurunkan standar capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum.

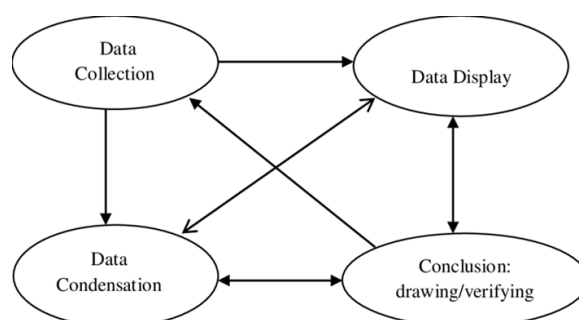
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini difokuskan di SMPN 28 Surabaya sebagai salah satu sekolah percontohan dalam implementasi pendidikan inklusif di Kota Surabaya. SMPN 28 Surabaya telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi sejak tahun 2010 dan hingga saat ini mendidik sebanyak 18 Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD). Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, sekolah ini konsisten menyediakan akomodasi yang layak serta media pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan seluruh peserta didik, baik peserta didik reguler maupun penyandang disabilitas. Lebih dari itu, SMPN 28 Surabaya dinilai berhasil membangun

lingkungan belajar yang inklusif dan ramah terhadap keberagaman, dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan tanpa membedakan latar belakang ras, agama, suku, maupun kondisi disabilitas yang dimiliki oleh peserta didik. Sebagian besar Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) di SMPN 28 Surabaya merupakan individu dengan hambatan intelektual, seperti tunagrahita ringan dan slow learner. Berdasarkan kondisi tersebut, sekolah menyelenggarakan dua bentuk program kompensatoris utama sebagai upaya pemenuhan kebutuhan belajar yang sesuai, yakni program kompensatoris berupa modifikasi pembelajaran pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), serta program kompensatoris berbasis adaptasi keterampilan bina diri dalam bentuk kegiatan Cooking Class.

Pelaksanaan program kompensatoris di SMPN 28 Surabaya tidak hanya berhenti pada tahap implementasi semata, melainkan juga dilengkapi dengan proses evaluasi yang dilakukan secara berkala dan kolaboratif oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK), Guru Bimbingan dan Konseling (BK), serta guru mata pelajaran. Berbeda dengan beberapa sekolah lain yang belum menerapkan program kompensatoris secara sistematis, SMPN 28 Surabaya telah melaksanakan tahapan program secara menyeluruh, dimulai dari proses perencanaan, pengembangan, hingga evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menindaklanjuti keberlanjutan program serta menilai perkembangan masing-masing peserta didik. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berbagai bentuk akomodasi yang telah disediakan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif implementasi program kompensatoris dalam rangka pemenuhan akomodasi yang layak, dimulai dari proses identifikasi dan asesmen awal hingga proses evaluasi sebagai bentuk akomodasi yang telah dipenuhi oleh SMPN 28 Surabaya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif dengan tujuan bahwa penelitian ini dapat mengkaji secara mendalam terkait dengan implementasi dari program kompensatoris. Peneliti juga akan mendeskripsikan bagaimana bentuk akomodasi yang layak yang telah disediakan oleh SMPN 28 Surabaya sebagai dalam proses pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 28 Surabaya yang berlokasi di Jalan Raya Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur. Alasan SMPN 28 Surabaya menjadi Lokasi penelitian ini yaitu dikarenakan sekolah ini menjadi contoh dari penerapan sekolah inklusi di Kota Surabaya. Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari melaksanakan wawancara, observasi, serta tinjauan dokumen-dokumen terkait program kompensatoris. Pada penelitian ini, data diperoleh dari Wakil Kepala Sekolah, Koordinator Guru Pembimbing Khusus, Guru Pembimbing Khusus, Guru BK, Koordinator Guru Kelas, serta para Peserta Didik Penyandang Disabilitas itu sendiri. Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data.



Gambar 1. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

Uji keabsahan data meliputi, uji kredibilitas dengan triangulasi dan membercheck, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. kerangka kerja yang dirancang untuk menilai kualitas penelitian. Untuk mengevaluasi kredibilitas data kualitatif, berbagai teknik digunakan, termasuk triangulasi dan membercheck. Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai sumber atau metodologi untuk mengonfirmasi konsistensi hasil. Sementara itu membercheck memungkinkan penelitian untuk meninjau temuan, memastikan bahwa interpretasi tersebut akurat.

3. TEMUAN DAN DISKUSI

Akomodasi yang layak menurut Yuwono & Utomo (2021) dalam proses pembelajaran bagi siswa dengan hambatan intelektual, diperlukan berbagai bentuk penyesuaian yang dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing anak. Penyesuaian ini bisa mencakup cara penyajian materi, metode pengajaran, maupun bentuk bahan ajar yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Selain aspek akademis, pendekatan pengajaran juga diarahkan pada pengembangan kemampuan praktis, seperti keterampilan hidup sehari-hari dan interaksi sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar Peserta Didik Penyandang Disabilitas di SMPN 28 Surabaya mengalami hambatan intelektual, sekolah tersebut menerapkan program dukungan berupa kegiatan Kesenian serta pelatihan Bina Diri melalui Cooking Class. Program ini dijalankan melalui tahapan perencanaan, pengembangan program sesuai hasil perencanaan, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya. Rangkaian ini menjadi dasar temuan utama dalam penelitian terkait implementasi program kompensatoris di SMPN 28 Surabaya

3.1. Perencanaan program kompensatoris Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan akomodasi yang layak di SMPN 28 Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan terkait dengan implementasi program kompensatoris PDPD di SMPN 28 Surabaya dimana proses diawali dengan identifikasi dan asesmen awal, setelah itu pembuatan PPI berdasarkan hasil asesmen masing-masing PDPD dimana di dalam PPI tersebut program kompensatoris dirancang. Selain itu, perencanaan program kompensatoris juga memuat terkait anggaran yang dibutuhkan untuk implementasi program kompensatoris. Berikut temuan penelitian proses perencanaan program kompensatoris.

3.1.1. Identifikasi dan asesmen awal

Proses pengenalan terhadap siswa berkebutuhan khusus di SMPN 28 Surabaya dimulai sejak tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tujuan dari identifikasi awal ini adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hambatan belajar yang mungkin dialami PDPD, baik yang berkaitan dengan kemampuan inderawi, motorik, emosi, intelektual, maupun interaksi sosial (Astati et al., 2018). Jalur inklusi menjadi pintu masuk khusus bagi calon peserta didik penyandang disabilitas untuk dapat diterima SMPN 28 Surabaya. Pada prosesnya, orang tua atau wali diwajibkan mengikuti prosedur identifikasi dan asesmen awal. Mereka juga harus menyerahkan hasil pemeriksaan psikologis terbaru yang dikeluarkan oleh lembaga profesional dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Selanjutnya, Guru Pembimbing Khusus bersama Guru Bimbingan Konseling akan melakukan verifikasi melalui wawancara dengan pihak keluarga dan calon PDPD, guna memastikan kebenaran serta kecocokan data identifikasi yang telah diberikan.

Tahapan lanjutan dalam proses identifikasi peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) di SMPN 28 Surabaya adalah pelaksanaan asesmen awal. Asesmen, sebagaimana dijelaskan oleh Mansur (2019), merupakan proses sistematis yang dilakukan setelah adanya indikasi awal bahwa seorang peserta didik menyandang disabilitas dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai karakteristik dan kebutuhannya. Asesmen ini mencakup tiga aspek utama, yaitu kemampuan akademik, fungsi sensoris-motorik, serta aspek psikologis, emosional, dan sosial. Penilaian akademik berfokus pada kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, sementara asesmen sensoris-motorik bertujuan untuk mendeteksi gangguan pada fungsi penglihatan, pendengaran, serta kemampuan gerak dan keseimbangan tubuh. Adapun aspek psikososial meliputi penilaian terhadap potensi intelektual, stabilitas emosi, serta kemampuan peserta didik dalam menjalin interaksi sosial. Di SMPN 28 Surabaya, pelaksanaan asesmen awal dilakukan oleh tim Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang bekerja sama dengan guru mata pelajaran. Proses ini melibatkan serangkaian penilaian tertulis maupun non-tes, seperti tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (CALISTUNG), asesmen kemampuan motorik, okupasi, serta kemampuan komunikasi dan interaksi melalui asesmen wicara.

3.1.2. Program Pembelajaran Individual (PPI)

Penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) di SMPN 28 Surabaya dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan Guru Pembimbing Khusus (GPK), guru mata pelajaran, serta tenaga bimbingan dan konseling (BK). Informasi yang diperoleh dari hasil asesmen awal menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik PDPD. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, tim penyusun PPI mengelompokkan mata pelajaran ke dalam tiga kategori utama. Pertama, mata pelajaran yang cukup disesuaikan pada aspek metode pembelajaran agar sesuai dengan gaya belajar peserta didik PDPD, tanpa mengubah isi atau tujuan kurikulum. Kategori ini menjadi bagian dari implementasi program kompensatoris. Kedua, mata pelajaran yang memerlukan penyederhanaan atau modifikasi materi agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh peserta didik PDPD. Ketiga, mata pelajaran yang harus mengalami penyesuaian secara menyeluruh, baik dari segi isi, struktur, maupun metode penyampaian, untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi dan potensi peserta didik. Seluruh bentuk modifikasi tersebut kemudian dirangkum secara sistematis dalam dokumen PPI yang memuat strategi pembelajaran individual serta pelaksanaan program kompensatoris secara terstruktur.

Salah satu komponen utama dalam dokumen Program Pembelajaran Individual (PPI) yang telah disusun di SMPN 28 Surabaya adalah penyelenggaraan program kompensatoris. Setiap satuan pendidikan diwajibkan untuk merancang dan melaksanakan program ini sebagai bentuk layanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik hambatan dan kebutuhan belajar peserta didik penyandang disabilitas (PDPD). Program kompensatoris bertujuan untuk mendukung keterlibatan optimal PDPD dalam proses pembelajaran melalui penggantian tugas standar dengan aktivitas alternatif yang relevan dan terukur (Lubna et al., 2021). Pelaksanaan program ini mempertimbangkan kondisi individual setiap peserta didik agar mereka memperoleh pengalaman belajar yang setara dan bermakna. Di SMPN 28 Surabaya, penerapan program kompensatoris telah dirancang secara sistematis dan terintegrasi dalam PPI, sebagai bentuk konkret dukungan terhadap pendidikan inklusif.

3.1.3. Penyediaan anggaran

Penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik PDPD di SMPN 28 Surabaya diwujudkan melalui pelaksanaan program kompensatoris yang dirancang secara menyeluruh. Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak hanya mencakup pelibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran reguler, tetapi juga mencakup penyediaan dukungan tambahan yang memungkinkan keterlibatan aktif PDPD dalam proses belajar-mengajar. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah

pengalokasian anggaran khusus guna memastikan tersedianya akomodasi yang layak. Dana ini dirancang dalam kerangka perencanaan program kompensatoris dan digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan pendidikan. Pada pelaksanaannya, proses penganggaran dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan biaya secara spesifik untuk penyelenggaraan layanan pendidikan bagi PDPD di satuan pendidikan, termasuk kebutuhan operasional maupun pengembangan sarana yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif (Handayani, 2020).

Pelaksanaan program pendidikan inklusif menuntut adanya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung seluruh aktivitas pembelajaran. Perencanaan anggaran ini disusun berdasarkan rencana pembelajaran yang dirancang oleh sekolah penyelenggara inklusi sebagai pelaksana utama program (Bharata et al., 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMPN 28 Surabaya memperoleh pendanaan program kompensatoris dari sejumlah sumber resmi, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dukungan dari pemerintah daerah. Salah satu bentuk kegiatan dalam program kompensatoris yang memperoleh pendanaan adalah pelatihan Bina Diri melalui Cooking Class. Dalam kegiatan tersebut, kebutuhan seperti pengadaan kompor, wajan, dan perlengkapan makan sepenuhnya ditanggung melalui anggaran yang tersedia. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan tanpa membebankan biaya kepada orang tua atau wali, sehingga peserta didik penyandang disabilitas dapat mengikuti kegiatan secara gratis dan setara.

3.2. Pengembangan program kompensatoris Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan akomodasi yang layak di SMPN 28 Surabaya

Pengembangan dalam kegiatan pembelajaran, sebagaimana dijelaskan oleh Simanjuntak et al. (2020), merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan melalui penyesuaian baik pada konten materi maupun pendekatan yang diterapkan, termasuk bentuk pengantiannya. Dari segi materi, pengembangan dilakukan dengan cara memperbarui dan menyesuaikan isi bahan ajar agar selaras dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan. Sementara dari segi metode dan pendekatan, pengembangan melibatkan penyusunan strategi pembelajaran yang lebih efektif, yang didasarkan pada landasan teoritis maupun hasil implementasi praktik pembelajaran di lapangan. Langkah ini menjadi bagian integral dalam menciptakan proses pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Pengembangan pembelajaran Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang ada di SMPN 28 Surabaya diimplementasikan dalam program kompensatoris. Terdapat 2 program kompensatoris yang telah diimplementasikan sebagai bentuk pemenuhan akomodasi yang layak, yaitu program kompensatoris Kesenian dan program kompensatoris Bina Diri Cooking Class.

3.2.1. Implementasi Program Kompensatoris Kesenian

SMPN 28 Surabaya mengimplementasikan program kompensatoris dalam bentuk kegiatan alternatif pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), yang dikenal sebagai program kompensatoris kesenian. Program ini merupakan bentuk adaptasi media pembelajaran yang disesuaikan secara khusus untuk peserta didik penyandang disabilitas (PDPD). Berdasarkan pandangan Kemp dan Dayton yang dikutip dalam Silaban (2021), pemanfaatan media dalam pembelajaran memberikan berbagai keuntungan signifikan, antara lain membantu penyampaian

materi secara lebih seragam, meningkatkan daya tarik dan suasana menyenangkan dalam proses pembelajaran, serta menciptakan interaksi yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam teori belajar. Selain itu, media pembelajaran juga berperan dalam menghemat waktu, meningkatkan kualitas pemahaman, memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pembelajaran, membangun sikap positif peserta didik terhadap materi yang diajarkan, dan menggeser peran pendidik menjadi lebih aktif dan konstruktif dalam mendampingi proses belajar.



Gambar 2. Program Kompensatoris Kesenian

Pelaksanaan program kompensatoris pada mata pelajaran SBdP untuk peserta didik PDPD kelas 9, yang terdiri dari gabungan kelas 9A, 9B, dan 9C, dirancang dengan pendekatan visual yang inovatif guna memfasilitasi pemahaman terhadap materi kebudayaan daerah di Indonesia. Dalam kegiatan ini, peserta didik diberikan tugas untuk mewarnai sketsa Peta Indonesia, dengan setiap provinsi diberi warna berbeda sesuai dengan kreativitas masing-masing. Strategi ini memanfaatkan media visual sebagai sarana untuk memperkuat daya ingat dan pemahaman terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Warna digunakan sebagai indikator visual untuk menghubungkan wilayah geografis dengan representasi budaya seperti pakaian tradisional, rumah adat, dan lagu daerah. Penggunaan media visual dalam konteks ini sejalan dengan temuan Simanjuntak et al. (2020), yang menyatakan bahwa media yang memberikan konteks visual terhadap bacaan sangat membantu peserta didik yang mengalami kesulitan membaca dalam memahami informasi serta mengingat kembali isi materi. Dengan demikian, media visual berfungsi sebagai alat bantu yang efektif bagi peserta didik yang memiliki hambatan dalam memahami materi secara tertulis maupun lisan, dan tujuan tersebut tercermin secara nyata dalam penggunaan media peta dalam program kompensatoris kesenian di SMPN 28 Surabaya.

3.2.2. Implementasi Program Kompensatoris Cooking Class

Selain menjalankan program kompensatoris melalui modifikasi metode pembelajaran pada mata pelajaran Kesenian, SMPN 28 Surabaya juga mengembangkan bentuk adaptasi lain melalui kegiatan pengembangan keterampilan bina diri. Menurut Damastuti (2020) dalam *Buku Pendidikan Anak dengan Hambatan Intelektual*, program Bina Diri yang sebelumnya dikenal sebagai program Merawat Diri, didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik penyandang hambatan intelektual atau tunagrahita seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas harian, seperti makan, minum, berpakaian, dan menjaga kebersihan diri. Keterampilan dasar ini yang umumnya diperoleh anak-anak secara alami melalui proses pengamatan dan peniruan, perlu diajarkan secara eksplisit, terstruktur, dan sistematis kepada peserta didik dengan hambatan intelektual. Melalui program pembelajaran bina

diri, peserta didik PDPD diharapkan dapat mengembangkan kemampuan kemandirian sesuai kapasitas masing-masing, sehingga tidak terus-menerus bergantung pada bantuan orang lain. Di SMPN 28 Surabaya, bentuk konkret dari pembelajaran bina diri ini diimplementasikan melalui kegiatan kompensatoris berupa *Cooking Class*.



Gambar 3. Program Kompensatoris Cooking Class

Program *Cooking Class* dirancang sebagai bentuk pembelajaran kontekstual yang memadukan kerja sama antar peserta didik penyandang disabilitas dari kelas VII, VIII, dan IX. Dalam pelaksanaannya, setiap peserta didik diberikan tanggung jawab sesuai dengan tingkat kemampuan dan kemandiriannya. Guru Pembimbing Khusus (GPK) tidak mengambil peran sebagai pengajar utama, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang memberikan arahan umum serta memotivasi peserta didik untuk menyelesaikan tugas mereka secara mandiri berdasarkan pemahaman masing-masing. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam dua sesi utama, yakni membuat pisang goreng dan meracik es buah. Meskipun kegiatan ini dilakukan secara kelompok, pembagian tugas dilakukan secara individual agar setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan merawat diri secara mandiri. Pendidikan keterampilan bina diri bertujuan untuk membekali peserta didik tunagrahita dengan kemampuan menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Prima (2019), pendidikan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan dasar hidup, tetapi juga bertujuan menggali potensi peserta didik dan memberikan mereka aktivitas yang produktif dan bermakna, termasuk dalam mengisi waktu luang. Kegiatan *Cooking Class* ini bukan hanya berfokus pada kemampuan memasak, tetapi juga menanamkan nilai kerja sama, kedisiplinan dalam mengikuti instruksi, dan kemampuan menyelesaikan tugas secara mandiri dalam batas waktu yang telah ditentukan.

3.2.3. Sarana dan prasarana untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD)

Penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang mencakup dua kategori utama, yaitu sarana prasarana umum dan sarana prasarana khusus. Sarana prasarana umum mencakup fasilitas yang dapat digunakan secara bersama oleh seluruh peserta didik, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak. Sebaliknya, sarana prasarana khusus dirancang secara spesifik untuk mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik penyandang disabilitas (Muh & Uslan, 2020). Di SMPN 28 Surabaya, salah satu bentuk akomodasi yang telah direalisasikan adalah penyediaan ruang sumber sebagai tempat pelaksanaan program kompensatoris, serta penggunaan berbagai media pembelajaran penunjang kegiatan tersebut. Pemanfaatan fasilitas belajar ini merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, karena berperan dalam memperlancar dan mendukung aktivitas belajar secara langsung maupun tidak langsung. Alat bantu belajar yang relevan

dan sesuai kebutuhan bertujuan untuk mempermudah pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Oleh karena itu, keberadaan serta penggunaan sarana prasarana pembelajaran memiliki peran strategis dalam menunjang efektivitas proses pendidikan (Malau et al., 2022).



Gambar 4. Sarana dan Prasarana Umum dan Khusus

Pada pemanfaatannya, ruang sumber di SMPN 28 Surabaya dilengkapi dengan berbagai alat bantu belajar yang digunakan dalam program kompensatoris, seperti jam matematika, sketsa visual, perlengkapan kerajinan tangan, dan papan angka. Fasilitas lainnya yang mendukung kebutuhan peserta didik PDPD adalah toilet yang dirancang secara strategis, yaitu berada dekat dengan ruang sumber dan ruang Guru Pembimbing Khusus (GPK). Toilet tersebut dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan dilengkapi dengan alat bantu seperti pegangan dinding untuk menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik. Selain itu, sekolah juga menyediakan kursi roda yang dapat diakses di ruang sumber maupun Unit Kesehatan Sekolah (UKS), sebagai upaya mendukung mobilitas peserta didik yang memerlukan bantuan fisik. Penempatan ruang sumber yang berdekatan dengan ruang GPK dimaksudkan untuk memfasilitasi koordinasi antara peserta didik PDPD dan guru pembimbing secara lebih efisien, sekaligus memberikan kemudahan akses agar peserta didik tidak perlu berpindah jauh dari lingkungan belajarnya. Di samping itu, fasilitas umum lainnya seperti perpustakaan, ruang UKS, dan koperasi sekolah juga terbuka untuk digunakan oleh peserta didik PDPD tanpa adanya pembatasan, sehingga mendukung terciptanya suasana belajar yang inklusif dan mendorong interaksi yang setara antara peserta didik reguler dan penyandang disabilitas.

3.3. Evaluasi program kompensatoris Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan akomodasi yang layak di SMPN 28 Surabaya

Evaluasi program memiliki peran sentral sebagai alat bantu bagi para pemangku kebijakan dan pelaksana program dalam menganalisis data yang tersedia guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program serta mengoptimalkan manfaat yang diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Secara umum, evaluasi program merupakan pendekatan sistematis yang dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan praktis yang muncul dalam proses pelaksanaan program, baik dari sudut pandang manajerial maupun teknis. Evaluasi ini menitikberatkan pada penilaian kinerja di bidang pendidikan dengan memanfaatkan informasi yang dikumpulkan secara berkelanjutan dan terstruktur (Rahmafitri et al., 2024). Di SMPN 28 Surabaya, pelaksanaan evaluasi program kompensatoris

dilakukan oleh tim yang terdiri atas Guru Pembimbing Khusus (GPK), Guru Bimbingan dan Konseling (BK), serta guru mata pelajaran yang terkait.

3.3.1. Evaluasi Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh stakeholder terkait program kompensatoris

Berdasarkan hasil temuan penelitian, pelaksanaan evaluasi terhadap program kompensatoris dilakukan secara menyeluruh dan bersifat kolaboratif, melibatkan seluruh unsur pendidik yang berperan langsung dalam pelaksanaan layanan kompensatoris untuk peserta didik. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul selama proses implementasi. Hasil dari evaluasi menjadi rujukan penting dalam menyusun strategi pengembangan serta penyempurnaan program di masa mendatang (Arriani et al., 2021). Di SMPN 28 Surabaya, proses evaluasi dilaksanakan melalui forum diskusi yang melibatkan Guru Mata Pelajaran, Guru Bimbingan dan Konseling (BK), serta Guru Pembimbing Khusus (GPK). Setiap pendidik memberikan masukan berdasarkan peran dan hasil observasi mereka terhadap peserta didik, sehingga menghasilkan gambaran evaluatif yang komprehensif dan reflektif terhadap pelaksanaan program kompensatoris.

Evaluasi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjamin tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Hal ini sejalan dengan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa evaluasi pendidikan mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran serta hasil yang diperoleh. Dalam konteks pendidikan inklusif, evaluasi berperan dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, menyediakan umpan balik bagi peningkatan kualitas pembelajaran, serta memperkuat prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan (Zahroh & Hilmiyati, 2024). Evaluasi terhadap program kompensatoris mata pelajaran Kesenian difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kemampuan peserta didik dalam mempertahankan konsentrasi selama kegiatan berlangsung, konsistensi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, serta peningkatan minat belajar melalui penggunaan media visual. Penilaian dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan perbedaan minat dan potensi masing-masing peserta didik, sehingga hasil evaluasi dapat mencerminkan perkembangan personal secara lebih akurat. Sementara itu, dalam program *Cooking Class*, fokus evaluasi diarahkan pada aspek kepatuhan terhadap instruksi, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas secara bertahap, kemampuan memahami dan menjalankan prosedur kerja, serta keterampilan bekerja sama antar peserta didik. Efektivitas program turut diukur melalui peningkatan efisiensi pelaksanaan tugas dan keakuratan hasil kerja. Selain itu, perubahan perilaku dan aspek psikososial juga menjadi indikator penting yang digunakan untuk menilai keberhasilan program kompensatoris secara menyeluruh.

3.3.2. Indikator evaluasi program kompensatoris

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi pelaksanaan program kompensatoris *Cooking Class*, diketahui bahwa evaluasi program didasarkan pada sejumlah indikator spesifik. Indikator tersebut meliputi kemampuan okupasi peserta didik, kepatuhan terhadap instruksi dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, peningkatan pemahaman terhadap materi, serta aspek emosional seperti perubahan perilaku dan kemampuan dalam menjalin hubungan sosial. Selain itu, aspek keterampilan motorik halus, tingkat kemandirian, serta kualitas interaksi sosial juga turut menjadi

fokus utama dalam proses penilaian. Evaluasi ini tidak semata-mata ditujukan untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga digunakan sebagai landasan dalam menentukan langkah lanjutan, seperti pemberian terapi tambahan atau pendampingan khusus sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik. Sebagaimana dinyatakan oleh Ananda & Rafida (2017), evaluasi merupakan proses sistematis untuk menentukan nilai, kebermanfaatan, dan efektivitas suatu kegiatan, dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk dokumentasi yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan.

Dokumentasi laporan pelaksanaan program kompensatoris *Cooking Class* juga mencantumkan berbagai rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi yang telah dilakukan. Rekomendasi ini berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan program serta menjaga keberlanjutan implementasinya dalam jangka panjang. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan yang sukses umumnya ditandai oleh pemanfaatan hasil evaluasi sebagai landasan dalam merancang strategi pengembangan berikutnya, bukan sekadar dijadikan sebagai formalitas administratif (Mudatsir et al., 2024). Dalam konteks ini, laporan evaluasi program kompensatoris di SMPN 28 Surabaya merekomendasikan beberapa hal, antara lain peningkatan frekuensi pelaksanaan kegiatan, diversifikasi bentuk penugasan, pelibatan peserta didik dalam tahap perencanaan program, pemberian apresiasi serta motivasi untuk membangun rasa percaya diri peserta didik penyandang disabilitas, dan pelaksanaan evaluasi lanjutan untuk memantau perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu.

4. KESIMPULAN

Tahapan perencanaan program kompensatoris di SMPN 28 Surabaya diawali dengan proses identifikasi dan asesmen awal yang dilakukan pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Prosedur ini melibatkan tenaga profesional, seperti psikolog, untuk memastikan keabsahan hasil diagnosis disabilitas. Selanjutnya, pihak sekolah melakukan wawancara dan observasi untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai kondisi peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, sekolah menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) melalui pendekatan kolaboratif antara Guru Pembimbing Khusus (GPK), guru mata pelajaran, dan tenaga bimbingan konseling. Penyusunan PPI mempertimbangkan berbagai aspek kemampuan peserta didik, mencakup akademik, motorik, sosial, dan okupasi, guna menentukan bentuk modifikasi pembelajaran yang sesuai. Selain itu, penyediaan akomodasi yang layak ditopang oleh pendanaan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah daerah. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan alat bantu belajar dan perlengkapan praktik kegiatan, seperti dalam program *Cooking Class*, tanpa membebani orang tua peserta didik.

Pengembangan program kompensatoris di SMPN 28 Surabaya diwujudkan melalui penerapan pembelajaran adaptif dan penyediaan sarana pendukung yang inklusif. Dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), kegiatan pembelajaran dimodifikasi agar sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar peserta didik penyandang disabilitas. Kegiatan seperti mewarnai peta Indonesia diterapkan secara berkala di ruang sumber dan melibatkan PDPD dari berbagai kelas dalam satu angkatan untuk memperkuat pemahaman terhadap keberagaman budaya daerah. Sementara itu, dalam kegiatan bina diri, program *Cooking Class* dijalankan dengan pembagian peran sesuai tingkat kemampuan masing-masing peserta didik, di mana GPK berperan sebagai fasilitator. Peserta didik berlatih membuat pisang goreng dan es buah secara bertahap sebagai bagian dari pelatihan keterampilan hidup mandiri. Dukungan terhadap kegiatan ini juga diwujudkan melalui penyesuaian fasilitas fisik, seperti toilet ramah disabilitas yang dilengkapi pegangan dinding, ketersediaan kursi

roda di ruang sumber dan UKS, serta ruang sumber yang dilengkapi media pembelajaran. Di samping itu, peserta didik PDPD juga memiliki akses yang setara terhadap fasilitas umum seperti perpustakaan, koperasi, dan ruang UKS sebagai bentuk nyata implementasi prinsip inklusivitas.

Pelaksanaan evaluasi program kompensatoris di SMPN 28 Surabaya dilaksanakan secara menyeluruh dan kolaboratif dengan melibatkan guru kelas, guru mata pelajaran, guru Bimbingan Konseling (BK), serta Guru Pembimbing Khusus (GPK). Evaluasi dilakukan melalui diskusi informal serta penilaian individual yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi unik setiap peserta didik. Dalam program kesenian, evaluasi difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kemampuan peserta didik dalam menjaga konsentrasi, konsistensi dalam menyelesaikan tugas, serta peningkatan minat belajar melalui media visual. Sementara itu, evaluasi terhadap program Cooking Class menitikberatkan pada kepatuhan terhadap instruksi kerja, kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas, kemampuan memahami tahapan kerja, serta kerja sama antarpeserta didik. Di samping aspek kognitif, proses evaluasi juga mencakup aspek psikososial seperti perkembangan emosi, interaksi sosial, dan perubahan perilaku. Indikator evaluasi mencakup kemampuan okupasi, motorik halus, tingkat kemandirian, serta dinamika sosial-emosional peserta didik. Hasil evaluasi tidak hanya digunakan untuk mengukur efektivitas program, tetapi juga menjadi dasar dalam memberikan terapi tambahan atau pendampingan lanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.

REFERENSI

- Ananda, R., & Rafida, T. (2017). *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan* (Vol. 1). PERDANA PUBLISHING.
- Arriani, F., Agustawati, Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Tulalessy, C., & Herawati, F. (2021). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Astati, A., Mariam, R. S., & Nuraeni, S. P. (2018). *Prosedur Operasi Standar Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif: Identifikasi dan Asesmen*.
- Bharata, R. W., Pramudyastuti, O. L., & Sunaningsih, S. N. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 11(1), 158–178.
- Damastuti, E. (2020). *Pendidikan Anak dengan Hambatan Intelektual* (Vol. 1).
- Handayani, N. F. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Pascadesentralisasi Pendidikan. *JAMP: Jurnal Adminitrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(4), 332–341.
- Hidayah, N., Suyadi, Akbar, S. A., Yudana, A., Dewi, I., Puspitasari, I., Rohmadheny, P. S., Fakhruddiana, F., Wahyudi, & Wati, D. E. (2019). *Pendidikan Inklusi dan Anak Berkebutuhan Khusus* (1st ed.).
- Islam, A. D., Timorochmadi, F., Fakhruddin, M. Y., Yoseptry, R., Ratnawulan, T., & Rahayu, N. S. (2024). Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 12(1), 362–377.
- Kalalo, D. K. R., Nikolin Tambingon, H., Nicodemus, V., & Rotty, J. (2022). Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi dan Dampaknya pada Kreativitas Pembelajaran Guru-guru Sekolah Luar

- Biasa di Provinsi Sulawesi Utara Indonesia. *Journal on Teacher Education*, 4(2), 41–47.
www.bps.go.id
- Lafiana, N. A., Witono, H., & Affandi, L. H. (2022). Problematika Guru Dalam Membelajarkan Anak Berkebutuhan Khusus. *Journal of Classroom Action Research*, 4(2), 81–86.
- Lubna, Sulhan, A., Aziz, A., Astuti, F. H., Hadi, Y. A., Rizka, M. A., & Sarilah. (2021). *Pendidikan Inklusi* (Vol. 1). Sanabil.
- Malau, T. F., Harianja, K. N., Simarmata, Y., & Turnip, H. (2022). Pentingnya Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4).
- Mansur, H. (2019). *PENDIDIKAN INKLUSIF: Mewujudkan Pendidikan untuk Semua* (Vol. 1). Parama Publishing.
- Mudatsir, Harahap. Rasyid Ridho, Fitriyati, I., Talindong, A., Thoif, M., Chairunnisa, Arini, D., Nababan, H. S., Munandar, H., Hadikusumo, R. A., Ariantara, R. G., Purwana, R., Nimah, S. A. N., Maulani, G., Susilowati, N. E., Pratiwi, D., & Nurdini. (2024). *Perencanaan Program Pendidikan* (Vol. 1). PT SADA KURNIA PUSTAKA. <https://www.researchgate.net/publication/385511058>
- Muh, A. S., & Uslan, U. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Abdi Kasih Bangsa. *Musamus Journal of Primary Education*, 102–112. <https://doi.org/10.35724/musjpe.v2i2.2536>
- Ningrum, N. A. (2022). Strategi Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(2), 181–196.
- Paramansyah, H. A., & Parojai, M. R. (2024). *Pendidikan Inklusif dalam Era Digital* (Vol. 1). www.freepik.com
- Prima, D. Y. (2019). *Analisis Interaksi Anak Tunagrahita terhadap Game Edukasi Bina Diri*. 45–51.
- Rahmafriti, F., Deswita, E., Mulia, J. R., & Zulmuqim, Z. (2024). Konsep Dasar dan Perencanaan Evaluasi Program Pendidikan. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 23(1), 98–109. <https://doi.org/10.17467/mk.v23i1.1374>
- Silaban, S. (2021). *Pengembangan Program Pengajaran* (Vol. 1). Yayasan Kita Menulis. <https://www.researchgate.net/publication/349781881>
- Simanjuntak, M. P., Sinaga, L., Hardinata, A., & Simatupang, H. (2020). *Pengembangan Program dalam Pembelajaran* (Vol. 1). PT. Mediaguru Digital Indonesia.
- Yuwono, I., & Utomo, H. (2021). *Pendidikan Inklusi* (Vol. 1). DEEPUBLISH.
- Zahroh, F. L., & Hilmiyati, F. (2024). Indikator Keberhasilan dalam Evaluasi Program Pendidikan. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(03), 1052–1062. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i03.5049>